

Hasil Penelitian

STRATEGI PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL (SOCIAL ASSISTANCE FUNDS MANAGEMENT STRATEGY)

Irham Iskandar

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh, Indonesia
Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 26
e-mail: irhamis@yahoo.com

Diterima: 5 Maret 2017; Direvisi: 19 Maret 2017; Disetujui: 1 April 2017

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi tentang pengelolaan dana bansos melalui pendekatan SWOT. Metode yang digunakan adalah penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengembangkan temuan penelitian atau teori-teori sebelumnya, baik untuk keperluan ilmu murni maupun ilmu terapan dan sebagainya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada sampel dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam dengan para informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari jurnal, laporan-laporan ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan bahan-bahan lain yang relevan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu berupa data – data yang diperoleh memberikan gambaran secara statistik dengan tabulasi dalam bentuk tabel, grafik, dan peta. Selanjutnya kuisoener akan dilakukan pengujian data dengan menggunakan peralatan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal kelompok usaha relatif memiliki lebih banyak kelemahan berbanding kekuatan. Tetapi dari faktor eksternal peluang pengembangan usaha relatif sudah baik daripada sebuah tantangan. Ini menandakan bahwa strategi kebijakan yang perlu dilakukan dalam pembinaan kelompok usaha adalah memanfaatkan anggota kelompok berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan kelompok mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan serta peningkatan peran lembaga pendampingan yang membantu kelancaran anggota/kelompok usaha.

Kata kunci: dana bansos, pendekatan SWOT, faktor internal dan eksternal

ABSTRACT

The main objective of this study was to determine the strategy of the fund management bansos through SWOT approach. The method used is the development of research, the research is intended to develop research findings or theories before, both for pure science and applied science, and so on. The data used are primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews with a sample using a questionnaire and in-depth interviews with informants, while secondary data obtained through library consisting of journals, scientific reports, official government reports, and other materials relevant. Data analysis using descriptive qualitative method, namely in the form of data - the data obtained statistically illustrates the tabulation in the form of tables, graphs, and maps. Further testing will be done kuisoener data using descriptive statistics equipment. The results showed that internal factors relative business groups have more weakness versus strength. But of external factors as business development opportunities are relatively better than a challenge. This indicates that the policy strategy needs to be done in the coaching business group is utilizing the group members actively participate in group decision-making process from planning, implementation, control and maintenance activities as well as increasing the role of mentoring institution that helps smooth the member / group effort.

Keywords: social grants, SWOT approach, internal and external factors

PENDAHULUAN

Bantuan sosial merupakan suatu kegiatan pemerintah yang disalurkan bagi masyarakat yang memiliki kerentanan sosial sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi,

politik, bencana, dan fenomena alam. Pengelolaan belanja bantuan sosial tidak terlepas dari salah satu rangkaian kegiatan pengendalian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memberikan

keyakinan bahwa belanja bantuan sosial dikelola dengan baik, tepat sasaran, dan memenuhi tujuan-tujuan dari bantuan sosial itu sendiri. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 memiliki makna bahwa bantuan sosial sangat terkait dengan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan bersifat selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemberian bansos ini dari keuangan daerah (APBD) diperbolehkan berdasarkan PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemandagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar. Teori bantuan sosial yang pertama ditulis untuk penduduk Bruges oleh Jean Louis Vives dalam bukunya *De Subventionem Pauperum* yang terbit pada 1526. Gagasannya terhadap bantuan sosial adalah tindakan yang didasarkan pada solidaritas sosial, pemikiran ini diperlukan mengingat bagaimana saling kebergantungan antara manusia di dalam masyarakat. Artinya dana bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas antar manusia dari keterpurukan.

Bantuan sosial di Eropa Barat pada abad ke-17 dan 18 diberikan dalam sebuah pola umum kerjasama antara pemerintah pusat dan otoritas setempat. Di Inggris, UU Kemiskinan tahun 1601 melembagakan apa yang oleh Webb disebut sebagai bantuan kemiskinan dalam kerangka penindasan. Di bawah UU ini, pejabat lokal ditugaskan menarik pajak khusus dan menggunakan untuk menyediakan lapangan kerja bagi kaum miskin dan bantuan bagi orang-orang cacat. Hasilnya menjelang abad ke-19 pendapat masyarakat terkait kemiskinan mulai berubah bahwa masyarakat mulai mengakui bahwa seseorang bisa menjadi miskin bukan karena kesalahannya sendiri. Hal ini membuktikan keberhasilan pemerintah Inggris meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui bantuan sosial, peruntukan bantuan sosial digunakan untuk membuka lapangan kerja baru sehingga masyarakat miskin dapat dikelola untuk bisa bekerja dan dapat

berangsur-angsur meningkatkan taraf hidupnya ditengah-tengah masyarakat.

Tahun 2014 Provinsi Aceh mengalokasikan bantuan sosial sebesar Rp. 1,2 Triliun atau sedikit menurun dari tahun 2013 lalu yang mencapai Rp. 1,6 Triliun. Dana ini disalurkan kepada pemerintah atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, BUMD, kelompok masyarakat, dan yang terakhir kepada ormas. Meskipun demikian, ternyata penyaluran dana tersebut masih belum berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Malahan angka kemiskinan di aceh tahun 2014 meningkat 1,33 persen dari tahun 2013. Ini sangat memprihatinkan, dan menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki permasalahan dalam penggunaan dana bantuan sosial.

Ada ketimpangan yang terjadi mengapa hal tersebut terjadi, Delli (2014) mengemukakan bahwa permasalahan dalam bantuan sosial pada pemerintah daerah disebabkan oleh lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebelum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, permasalahan yang terjadi di pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan bantuan sosial adalah ketidakjelasan tentang definisi bantuan sosial yang akhirnya berakibat pada kesalahan dalam penganggaran; adanya unsur politik dalam penganggaran sehingga jumlah bantuan sosial meningkat menjelang pilkada; dan bentuk pertanggungjawaban yang terlalu sederhana dari penerima bantuan sosial.

Secara defenisi, bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Artinya, bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok yang bertujuan untuk melindungi kemungkinan terjadi resiko sosial yaitu potensi terjadinya kerentanan sosial sebagai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik dan fenomena.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria seperti selektif; memenuhi persyaratan penerima bantuan; bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan sesuai tujuan penggunaan. Secara empiris permasalahan

bantuan sosial pernah terjadi di beberapa negara, seperti China, Brasil, Turki dan Indonesia. Zhang (2012) mengemukakan bahwa artikel-artikel tentang bantuan sosial di China mengalami perbaikan setelah melalui tiga periode yaitu masa urban-first (1999-2003); masa debat (2003-2007); dan masa integrasi perkotaa-pedesaan (2007- sekarang). Kumpulan artikel tersebut sangat membantu dalam pengembangan kebijakan bantuan sosial.

Barrientos (2013) menjelaskan bahwa peran institusi pemberi bantuan sosial di Brazil lebih memperhatikan gagasan dan politik. Artinya pemerintah melakukan kontrak sosial yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan warga miskin seperti orang tua dan cacat. Ini juga sejalan dengan pemikiran Yaruk (2012) yang menyatakan bahwa kekuatan politik di Turki sangat menentukan arah bantuan sosial yang ditujukan. Lebih lanjut, kasus yang terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia tidak jauh berbeda, seperti penelitian oleh Latif, M dkk (2014) yang menyampaikan bahwa perencanaan belanja bantuan sosial di Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mewujudkan sebuah perencanaan strategis, padahal kegiatan belanja bantuan sosial seharusnya merupakan penjabaran visi dan misi yang ada di dalam RPJPD dan RPJMD. Demikian juga dengan hasil penelitian Rochmatullah dan Agung (2014) yang menjelaskan bahwa pendapatan daerah dan SILPA memberikan pengaruh signifikan pada alokasi bantuan sosial, dibandingkan pendapatan transfer dan politik.

Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan kendala terhadap pengelolaan dana hibah dan bansos kota tarakan adalah : (a) dana yang dikucurkan tidak seluruhnya dapat terserap oleh masyarakat; (b) administrasi usulan masih tergolong terlalu rumit; (c) SDM responden masih relatif terbatas; (d) peraturan/juknis yang selalu berubah-ubah; (e) perencanaan teknis program kegiatan belum ada, dan lokasi pembangunan tidak jelas/tumpang tindih /terkait masalah hukum; (f) rekening belanja sering tidak sesuai dengan RKB/RAB proposal; (g) kekecewaan dan rasa tidak bangga masyarakat terhadap penyaluran dana masih tinggi; (h) pemberian Hibah dan Bansos yang tidak sesuai ketentuan, umumnya belum pernah diberikan sanksi yang tegas; dan (j) ada indikasi pelaporan yang dibuat yayasan/ormas/organisasi profesi/kelompok masyarakat dan perorangan bersifat fiktif (Midiansyah, 2013).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah menyusun perumusan strategi untuk pengelolaan dana bansos dengan analisis SWOT. Diharapkan dengan konsep ini akan diketahui kelemahan, kekuatan,

kesempatan dan tantangan sehingga pemerintah dapat melakukan langkah-langkah strategis agat pengelolaan dana bansos tepat sasaran

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode survei. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Artinya objek penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan waktu dan anggaran. Berdasarkan metode tersebut, maka dipilihlah lokasi 12 pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh untuk dijadikan sampel dengan periode waktu 1 tahun yaitu 2013.

Dari 12 kabupaten/kota maka data yang terkait dengan penelitian ini difokuskan pada enam sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, perdagangan, dan jenis bantuan lainnya. Tiap sektor di pilih secara random dengan menentukan lokasi dan jumlah dana bansos yang dialokasikan pada tahun 2013. Kabupaten/kota dipilih secara random 6 SKPA yang terkait dengan alokasi dana bansos diatas Rp.20.000.000 pada 6 sektor dan pada setiap bidang dipilih 2 sampel secara random. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada sampel dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam dengan para informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari jurnal, laporan-laporan ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan bahan-bahan lain yang relevan.

Analisis datanya menggunakan konsep SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threath) yang disajikan dalam bentuk tabel untuk memetakan faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan. Berdasarkan tabel tersebut disusun strategi kebijakan yang mungkin dilaksanakan untuk mendapatkan hasil program bantuan sosial yang lebih baik (Rangkuti, 2015). Analisis ini untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis maupun pada lingkungan internal perusahaan (Rangkuti, 2015). Untuk memudahkan dalam implementasi analisis SWOT diperlukan kontruksi matriks SWOT, dengan mengkombinasikan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Matriks SWOT disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Analisis SWOT

Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
Faktor Eksternal	Peluang	Tantangan
	Strategi SO	Strategi WO
	Strategi ST	Strategi WT

Sumber: Rangkuti (2015)

Dari matriks analisis SWOT seperti yang tersaji pada Tabel 1 dapat diidentifikasi terdapat empat strategi, yaitu Pertama strategi SO yang merupakan strategi untuk menggunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Kedua, strategi WO yang merupakan strategi mengatasi semua kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang

ada. Ketiga, strategi ST yang merupakan strategi menggunakan semua kekuatan untuk menghindari dari semua ancaman. Keempat, strategi WT yang merupakan strategi menekan semua kelemahan dan mencegah semua ancaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis faktor internal adalah kajian kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh kelompok usaha dalam mengembangkan atau membudidayakan produk yang akan dihasilkan. Banyak aspek yang dapat dianalisis terhadap faktor internal baik kekuatan maupun kelemahan dalam alokasi dana pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk bantuan sosial. Berdasarkan hasil kajian di lapangan menurut pandangan responden, maka dapat digambarkan sebagaimana pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)

No.	Pertanyaan	Mean	Kesimpulan
1.	Fasilitas yang tersedia dan dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha	3,75	Kekuatan
2.	Kemudahan memperoleh informasi tentang Program Bansos	3,35	Kelemahan
3.	Kemudahan ikut berpartisipasi dalam menyusun program kelompok usaha	4,53	Kekuatan
4.	Tehnologi modern yang dimiliki kelompok usaha untuk mendukung kegiatan	3,06	Kelemahan
5.	Kemampuan/pengusahaan ilmu pengetahuan untuk percepatan perkembangan kegiatan kelompok	3,59	Kekuatan
6.	Kemampuan/penguasaan teknologi bidang usaha oleh anggota kelompok	3,33	Kelemahan
7.	Kecukupan modal usaha yang disediakan oleh Program Bansos	3,35	Kelemahan
8.	Penyajian buku laporan keuangan usaha	3,12	Kelemahan
9.	Ketrampilan manajemen keuangan usaha	3,29	Kelemahan
10.	Ketrampilan manajemen pemasaran komoditas	3,51	Kekuatan
11.	Kondisi koperasi/badan usaha	3,22	Kelemahan
12.	Setiap anggota kelompok memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan	3,73	Kekuatan
	Rerata	3,49	Kelemahan

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dari 12 indikator faktor internal, terdapat 7 indikator merupakan kelemahan di wilayah kajian ini. Sisanya terdapat 5 indikator yang menjadi kekuatan, sehingga secara rerata diperoleh nilai sebesar 3,49 yang bermakna kelompok usaha masih relatif memiliki lebih banyak kelemahan berbanding kekuatan. Sejalan dengan salah satu faktor kelemahan yang diteliti oleh Latif (2014) mengemukakan bahwa perencanaan anggaran belanja bantuan sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah belum

sepenuhnya mencerminkan sebuah perencanaan strategis. Artinya dokumen perencanaan yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) harus memiliki kesesuaian secara jelas. Bila hal tersebut tidak diatasi, maka penerima bansos tidak mengetahui apakah program bansos tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah dan tepat sasaran.

Midiansyah (2013) menjelaskan juga beberapa permasalahan yang menyebabkan

kelemahan internal seperti pemberian bansos yang tidak sesuai ketentuan, umumnya belum pernah diberikan sanksi yang tegas; dan terindikasi pelaporan yang dibuat yayasan/ormas/organisasi profesi/kelompok masyarakat dan perorangan bersifat fiktif. Sejalan dengan itu, Yarus (2012) mengungkapkan bahwa perlu ada kebijakan prioritas dalam menentukan program dan kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan.

Faktor eksternal (kesempatan dan tantangan) merupakan kajian faktor yang berada di luar yang tidak mampu dipengaruhi oleh stakeholder di daerah kajian, namun faktor ini memberikan dampak terhadap perkembangan kelompok usaha. Berdasarkan hasil kajian untuk menggali pandangan responden terhadap indikator faktor eksternal ini akan disajikan dalam Tabel 3:

Tabel 3. Faktor Eksternal (Kesempatan dan Tantangan)

No.	Pertanyaan	Mean	Kesimpulan
1.	Kemudahan memperoleh layanan program BANSOS dari pemerintah kecamatan/kabupaten	3,14	Tantangan
2.	Peraturan perundangan untuk program BANSOS	3,20	Tantangan
3.	Pembinaan oleh lembaga pemerintah	3,92	Kesempatan
4.	Pembinaan oleh lembaga non pemerintah	2,73	Tantangan
5.	Peluang atau adanya potensi yang memadai untuk pengembangan kelompok usaha	3,63	Kesempatan
6.	Segala keputusan yang diambil dalam musyawarah desa berpihak kepada masyarakat miskin	3,55	Kesempatan
7.	Setiap pengambilan keputusan atau tindakan pemerintahan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan telah mempertimbangkan sistem pelestariannya	3,53	Kesempatan
8.	Peran lembaga pendampingan yang membantu kelancaran anggota/kelompok usaha	2,98	Tantangan
9.	Akses Transportasi	3,59	Kesempatan
10.	Akses Komunikasi	4,57	Kesempatan
11.	Kondisi keamanan lingkungan	3,90	Kesempatan
12.	Keadaan bencana	3,47	Tantangan
Rerata		3,52	Kesempatan

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (diolah)

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat peluang atau kesempatan yang dimiliki di wilayah penelitian. Hal ini menandakan adanya kemudahan memperoleh layanan program bansos dari pemerintah kecamatan/kabupaten dan peraturan perundangan yang masih dikategorikan tantangan. Selain itu tidak adanya pembinaan oleh lembaga non pemerintah, dan masih rendahnya peran lembaga pendampingan program yang dapat membantu kelancaran kelompok usaha serta keadaan bencana yang masih menghambat pengembangan usaha juga merupakan tantangan yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Midiansyah (2013) yang menyatakan bahwa tingkat kerentanan masyarakat terhadap gejala perubahan bidang ekonomi, sosial dan budaya kemasyarakatan masih tinggi, terutama untuk mengatasi keadaan-keadaan darurat dan bencana yang tak terduga. Namun, sudah baiknya pembinaan oleh lembaga pemerintah, terdapatnya potensi pengembangan

usaha yang memadai, berpihaknya keputusan musyawarah desa kepada masyarakat miskin, dan sudah mulai baiknya tahapan pengambilan keputusan pada tingkat pemerintahan desa merupakan peluang/kesempatan bagi pemberdayaan kelompok usaha. Lebih lanjut, akses transportasi, komunikasi, dan kondisi keamanan lingkungan yang semakin kondusif merupakan peluang yang dapat mendukung kegiatan usaha baik secara individu maupun kelompok.

Secara menyeluruh, nilai rerata faktor eksternal adalah 3,52 yang menunjukkan peluang pengembangan usaha relatif sudah baik ditinjau dari indikator faktor pendukung dari luar kelompok usaha tersebut. Mengacu kepada faktor internal dan eksternal di atas, maka dapat disusun suatu strategi sebagai berikut: Strategi ini menggambarkan dengan kekuatan yang ada di internal agar dapat dipergunakan untuk memanfaatkan kesempatan dari sisi eksternal. Secara lebih terperinci dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5. Strategi S – O (Kekuatan – Kesempatan) BANSOS

No.	Kekuatan (S)	Kesempatan (O)
1.	Fasilitas yang tersedia dan dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha.	Pembinaan oleh lembaga pemerintah.
2.	Kemudahan ikut berpartisipasi dalam menyusun program kelompok usaha.	Peluang atau adanya potensi yang memadai untuk pengembangan kelompok usaha.
3.	Kemampuan/pengusahaan ilmu pengetahuan untuk percepatan perkembangan kegiatan kelompok.	Segala keputusan yang diambil dalam musyawarah desa berpihak kepada masyarakat miskin
4.	Ketrampilan manajemen pemasaran komoditas.	Setiap pengambilan keputusan atau tindakan pemerintahan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan telah mempertimbangkan sistem pelestariannya
5.	Setiap anggota kelompok memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan.	Akses Transportasi
6.		Akses Komunikasi
7.		Kondisi keamanan lingkungan.

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (diolah)

Strategi ini menggambarkan dengan kekuatan yang ada di internal agar dapat dipergunakan untuk menghadapi tantangan dari

sisi eksternal. Secara lebih terperinci dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 6. Strategi S – T (Kekuatan – Tantangan) BANSOS

No.	Kekuatan (S)	Tantangan (T)
1.	Fasilitas yang tersedia dan dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha.	Kemudahan memperoleh layanan program BANSOS dari pemerintah.
2.	Kemudahan ikut berpartisipasi dalam menyusun program kelompok usaha.	Peraturan perundangan untuk program BANSOS.
3.	Kemampuan/pengusahaan ilmu pengetahuan untuk percepatan perkembangan kegiatan kelompok.	Pembinaan oleh lembaga non pemerintah.
4.	Ketrampilan manajemen pemasaran komoditas.	Peran lembaga pendampingan yang membantu kelancaran anggota/kelompok usaha.
5.	Setiap anggota kelompok memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan.	Keadaan bencana.

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (diolah)

Strategi ini merekomendasikan dengan menghilangkan kelemahan yang ada di internal agar dapat memanfaatkan peluang dari sisi eksternal.

Secara lebih terperinci dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 7. Strategi W – O (Kelemahan – Kesempatan) BANSOS

No.	Kelemahan (W)	Kesempatan (O)
1.	Kemudahan memperoleh informasi tentang Program Bansos	Pembinaan oleh lembaga pemerintah.
2.	Tehnologi modern yang dimiliki kelompok usaha untuk mendukung kegiatan.	Peluang atau adanya potensi yang memadai untuk pengembangan kelompok usaha
3.	Kemampuan/penguasaan teknologi bidang usaha oleh anggota kelompok	Segala keputusan yang diambil dalam musyawarah desa berpihak kepada masyarakat miskin

4.	Kecukupan modal usaha yang disediakan oleh Program Bansos	Setiap pengambilan keputusan atau tindakan pemerintahan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan telah mempertimbangkan sistem pelestariannya
5.	Penyajian buku laporan keuangan usaha	Akses Transportasi
6.	Ketrampilan manajemen keuangan usaha	Akses Komunikasi
7.	Kondisi koperasi/badan usaha.	Kondisi keamanan lingkungan.

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (diolah)

Strategi ini menggambarkan dengan menghilangkan kelemahan yang ada di internal agar dapat dipergunakan untuk menghadapi

tantangan dari sisi eksternal. Secara lebih terperinci dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 8. Strategi W – T (Kelemahan – Tantangan)

No.	Kelemahan (W)	Tantangan (T)
1.	Kemudahan memperoleh informasi tentang Program Bansos	Kemudahan memperoleh layanan program BANSOS dari pemerintah.
2.	Tehnologi modern yang dimiliki kelompok usaha untuk mendukung kegiatan.	Peraturan perundangan untuk program BANSOS.
3.	Kemampuan/penguasaan teknologi bidang usaha oleh anggota kelompok.	Pembinaan oleh lembaga non pemerintah.
4.	Kecukupan modal usaha yang disediakan oleh Program Bansos	Peran lembaga pendampingan yang membantu kelancaran anggota/kelompok usaha.
5.	Penyajian buku laporan keuangan usaha	Keadaan bencana.
6.	Ketrampilan manajemen keuangan usaha	
7.	Kondisi koperasi/badan usaha.	

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (diolah)

Berdasarkan empat strategi diatas dapat diketahui bahwa pengembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha sebaiknya didukung dengan kelengkapan peraturan-peraturan bansos yang memudahkan pelaku usaha dalam mengelola bansos, selain itu bagi penerima bansos perlu didukung data base agar bantuan tepat sasaran dan ini masih belum diatur dalam Pergub Aceh Nomor 59 Tahun 2013.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa faktor internal kelompok usaha relatif memiliki lebih banyak kelemahan berbanding kekuatan. Tetapi dari faktor eksternal peluang pengembangan usaha relatif sudah baik daripada sebuah tantangan. Selain itu, perlu ada aturan khusus atau juknis yang mengatur pengelolaan bansos.

REKOMENDASI

Strategi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan bansos, adalah sebagai berikut :

1. faktor internal melalui kemandirian kelompok seperti usaha yang dibangun dipastikan sesuai dengan keahlian/keterampilan kelompok, perlu adanya pelatihan-pelatihan bagi penerima bansos untuk penguatan kelembagaan dan keterampilan tehnis usaha, serta bantuan modal yang memadai sesuai kebutuhan kelompok usaha yang dibangun seperti bantuan peralatan usaha dan lainnya.
2. faktor eksternal melalui kemudahan memperoleh layanan program bansos dari pemerintah kecamatan/kabupaten dan peraturan perundangan, pembinaan oleh lembaga non pemerintah, dan meningkatkan peran lembaga pendampingan program yang dapat membantu kelancaran kelompok usaha serta mengantisipasi keadaan bencana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari Jurnal Inovasi yang telah memberikan rekomendasi perbaikan bagi tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Barrientos, A. 2013. The Rise Of Social Assistance In Brazil, development and change, Volume 44, Issue 4, pages 887–910.

Delli, Herman. 2014. Peranan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) dalam Mengelola Belanja Bantuan Sosial (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah), Tesis-UGM, 2014

Latif, M, Andy FW, dan Tjahjanulin D. 2014. Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Wacana Vol. 17 No. 2.

Midiansyah, 2013. Kajian Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Kota Tarakan, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Volume 29 No. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Aceh

Rangkuti, Freddy. 2015. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Rochmatullah MR, dan Agung Nur Probohudono. 2014. Praktik Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia, SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram 24-27 Sept 2014.

Yoruk, E. 2012. Welfare Provision as Political Containment The Politics of Social Assistance and the Kurdish Conflict in Turkey, Politics & Society, Vol 40, Issue 4.

Zhang, H. 2012. Discourse change and policy development in social assistance in China. International Journal of Social Welfare, Volume 21, Issue 4, pages 433–442.